

## ACEH TAMIANG DALAM TARGET



**Arahan dari Pokja PKP dalam Target Pengurangan Luasan Kumuh dan Capaian KPI Program KOTAKU, KBIK Mandiri Kamis, 15 Februari 2018**

Dalam Sambutan sekaligus arahan beliau menyampaikan bahwa target pengurangan luasan kumuh bukan hanya sepenuhnya tugas pokja PKP saja namun merupakan tugas kita bersama dalam menuntaskan pemukiman kumuh yang layak huni dan berkelanjutan dengan dukungan sinergis program dan perencanaan melalui KOLABORASI multi sektor.

Dalam Paparan dan penyampaian pak dedi Panggilan akrab beliau menekankan bahwa setiap perencanaan yang tertuang dalam anggaran yang sudah ditetapkan baik melalui APBN maupun APBD bahkan dari sumber lain tetap terfokus pada lokasi yang ada dalam luasan SK Kumuh dan luasan FLAG

Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) Mandiri yang dilaksanakan di AULA BAPPEDA Aceh Tamiang Kamis, 15 Februari 2018 merupakan agenda rutin setiap bulannya dilaksanakan tim pendamping KOTAKU dan pokja PKP sebagai bentuk bagian dari rencana kerja dan ketercapaian target pengurangan luasan kumuh baik secara pendampingan dilapangan sesuai Master Schedule Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sehingga target dan tindaklanjut dalam penanganan luasan kawasan pemukiman kumuh yang ada dalam SK Bupati dan luasan pemukiman secara nasional menjadi rujukan prioritas tahun penanganan yang segera dituntaskan menjadi 0 Ha.



**Target Pengurangan Luasan Kumuh dan Capaian KPI Program KOTAKU**

Hal inilah yang melatarbelakangi proses intensitas pendampingan dan pemahaman bersama bagi peserta KBIK terutama menyangkut bahan diskusi yang akan menjadi target dan tujuan bersama, kegiatan ini di hadiri dari Pokja PKP, Satker PIP, Camat Kualasimpang, Datuk dan BKM Kampung Bukit Tempurung, Datuk dan BKM Kampung Perdamaian, Datuk dan BKM Kampung Kota Kualasimpang, Datuk dan BKM Kampung Kota Lintang, Datuk dan BKM Kampung Sriwijaya, perwakilan dari SANIMAS, P3MD dan tim kota tanpa kumuh Aceh Tamiang.

Yang menjadi target luasan Nasional dan akan di selesaikan tahun 2018 ini. Bahkan penyelesaian luasan kumuh ini diperkuat melalui pemahaman dan kapasitas para pelaku stakeholder dan BKM. Sehingga koneksitas perencanaan baik penanganan melalui skala lingkungan dan skala kota (Kawasan) dapat tertuang dalam dokumen RPLP yang terkonsolidasi di RP2KPKP sehingga memberikan kontribusi yang besar dalam Penanganan luasan kumuh yang kita harapkan bersama..

Kegiatan KBIK Mandiri di buka oleh Perwakilan Pokja PKP bapak Dedi Nurfadli, ST dengan tema diskusi “Target pengurangan luasan kumuh dan capaian KPI (key Performance Indicators/Indikator Kinerja Utama) Aceh Tamiang tahun 2018”.

Lanjut Halaman 3

## Suara Permukiman

### PENASEHAT

**BUPATI KABUPATEN  
ACEH TAMIANG  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN  
ACEH TAMIANG**

### PENGARAH

**Kepala Dinas PU Dan Cipta  
Karya Kabupaten  
Aceh Tamiang  
Team Leader OC 01 Aceh**

### Pempinan Umum

**Korkot  
Kabupaten Aceh Tamiang  
Siti Khadijah, ST**

### Pempinan Redaksi

**Dra. Humaira Muclis**

### Dewan Redaksi/Tim Liputan

**Masrizal,S.Kom  
Zul Azhar,ST  
Rinaldi Buchari.SE  
Agung Pratama.ST  
Tommy Lazuardi, ST  
Tommy Lazuardi,ST**

### Alamat Redaksi

**Dsn Satelit Graha No F8  
Desa Tanah Terban  
Kec, KarangBaru  
Kab, Aceh Tamiang**

## SALAM KOTAKU

Kalimat permukiman kumuh menyebabkan kita langsung terbayang kawasan yang tidak teratur, padat, serta minim infrastruktur. Hal ini menyebabkan permukiman kumuh menjadi target sebagai kawasan yang harus dibenahi melalui program-program pemerintah. Salah satu Program pemerintah berbasis masyarakat yang telah dicanangkan Pemerintah yaitu program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Pemerintah saat ini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 memiliki target tercapainya penanganan permukiman kumuh perkotaan seluas 38.431 Ha menjadi 0%.

Program Kota Tanpa kumuh merupakan upaya strategi Direktorat pengembangan Kawasan Permukiman, Dirjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020.

KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pengaku kepentingan lainnya di kabupaten/Kota serta Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerean 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Peran Pemda Dlam Program Kotaku : Sebagai Regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunann permukiman. Memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan permukiman kumuh skala lingkungan, membangun kolaborasi antar pelaku, program dan pendanaan, membangun atau menguatkan peran kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP).



### Tentang Program KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 - 2019. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha.

### Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

## ACEH TAMIANG DALAM TARGET



Hasil Numerik Baseline Kumuh dalam Target Pengurangan Luasan Kumuh dan Capaian KPI Program KOTAKU, KBIK Mandiri Kamis, 15 Februari 2018

Sehingga koneksitas perencanaan baik penyelesaian melalui skala lingkungan dan skala kota (Kawasan) dapat tertuang dalam dokumen RPLP dan RP2KPKP dan memberikan kontribusi yang besar dalam Penanganan luasan kumuh.

Pada kesempatan yang sama beberapa pertanyaan yang di ajukan dari perwakilan datuk adalah mengenai operasional pengangkutan sampah yang menjadi persoalan kampung dan merupakan permasalahan prioritas dalam numerik baseline hingga ke TPS3R. Hal ini di pertegas langsung oleh bapak Sanusi SKM selaku Kabid. Kebersihan DLH Kabupaten Aceh Tamiang. Bapak Sanusi. SKM menyampaikan bahwa setiap pengangkutan yang berfungsi saat ini berjalan rutin dari DLH sendiri. Sedangkan alat pengangkutan sampah berupa becak viar beroperasi dari pagi ke lokasi lokasi yang sudah menjadi sasaran. Sehingga proses pengangkutan dari kampung hingga langsung ke pembuangan TPS saat ini terus beroperasi.

Bahkan dengan bertambahnya kapasitas pengolahan dari sampah sendiri DLH tetap mengarahkan untuk membuang sampah di satu titik dan seterusnya menjadi pekerjaan petugas angkut sampah dari DLH yang membawanya ke TPS 3R yang ada.

Demikian juga saran dan masukan dari Satker PIP Aceh Tamiang bapak Wan Zulham, ST menyampaikan bahwa pada prinsipnya komunikasi keberpihakan baik saat perencanaan. maupun pelaksanaan kegiatan di mulai adanya kerjasama yang baik sehingga melahirkan suatu kegiatan yang memang terakselerasi dalam dokumen perencanaan.



Penyepakatan Hasil Numerik Baseline Kumuh dalam Target Pengurangan Luasan Kumuh Program KOTAKU,

Saat momen yang sama koordinator 02 (koorkot) Aceh Tamiang Siti Khadizah menyampaikan kontribusi pengurangan kumuh melalui FLAG sebesar 1,49 Ha tahun 2017 yang dapat mempengaruhi pengurangan luasan kumuh dari 53,31 Ha luasan kumuh yang ada. Sehingga target bersama tahun 2018 ini menjadi momentum sinergis program melalui kolaborasi yang diketahui koneksitas mempengaruhi dalam pencapaian 0 Ha. Selanjutnya mengenai persoalan utama kita ada di Sampah, secara numerik baseline penanganan permasalahan ini akan tertuntaskan melalui dinas DLH yang memang domainnya. Terkait dengan skala Kota (Kawasan) akan terukur bila koneksitas dengan skala lingkungan melalui kolaborasi. Sehingga roadmap penanganan luasan kawasan kumuh terpetakan.

Di akhir acara diskusi, Pokja PKP menegaskan bahwa tidak ada persoalan dengan status lahan dalam skala lingkungan maupun skala kawasan. Proses action plan yang mewarnai pertanggungjawaban kita bersama dalam menuntaskan luasan kumuh yang ada di kampung kita secara menyeluruh, sehingga perencanaan dan penanganan luasan kawasan pemukiman kumuh dapat terukur secara komprehensif di aceh Tamiang.

Diinformasikan oleh:

Siti Khadijah, ST

Korkot Aceh Tamiang OC 1 Aceh  
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

## TARGET KOTAKU

TARGET	SKALA GAMPONG	SKALA KOTA
Sosialisasi	Muatan gerakan 100-0-100 dan Revitalisasi Peran BKM dlm penanganan kumuh	Muatan gerakan 100-0-100 dan Orientasi Pemda sbg Nakhoda penanganan kumuh
Pemetaan Kumuh	Baseline 100-0-100 (by name by adress) & Delinasi Kumuh	SK Walikota ttg Profil Kumuh berdasarkan Baseline 100-0-100
Road Map Penanganan Kumuh	Tersusun Road Map penanganan kumuh 2017-2019 di tingkat Gampong	Tersusun Road Map penanganan kumuh 2017-2019 di tingkat Kota
Perencanaan Program	Tersusun RPLP dan RTPLP serta DED utk Program ND dan Proposal utk Livelihood	SK Walikota ttg RP2KPKP (SIAP) berbasis RPLP dan RTPLP
Memorandum Program	Penyepakatan perencanaan sumber dana program untuk pembiayaan RPLP & RTPLP	SK Walikota perencanaan sumber dana program utk pembiayaan RP2KPKP/SIAP
Perencanaan Teknis	Tersusun DED-DED untuk Program ND dan Proposal2 untuk Program Livelihood	Tersusun DED-DED utk investasi Infrastruktur kota & kolaborasi kota, pembiayaan dari Pemda
Kelembagaan	Revitalisasi Peran BKM dalam percepatan penanganan kumuh Berfungsi KSM-KSM kegiatan infrastruktur, livelihood, kolaborasi kota dan O & P	SK walikota dan berfungsinya Pokja PKP, BDC dan Federasi UPK SK Walikota pembentukan & berfungsinya Pokja Kolaborasi (untuk kolaborasi kota)
Pendanaan	Pendanaan RPLP & RTPLP dari non-program adl 75% dr total biaya RPLP & RTPLP	Pendanaan RP2KPKP/SIAP dari non-program adl 75% dr total biaya
Kolaborasi	75% kegiatan RPLP & RTPLP bersumber dari kolaborasi (channeling), in cash & in kind	75% kegiatan RP2KPKP/SIAP bersumber dari kolaborasi (channeling), in cash & in kind
Key Performance Indicators	Road Map KPI 2017-2020 skala kelurahan seluruhnya tercapai	Road Map KPI 2017-2020 skala Kota seluruhnya tercapai

## TARGET KOTAKU

### IDENTIFIKASI TINGKAT KEKUMUHAN

(IDENTIFIKASI KUMUH DILAKUKAN PER DUSUN SETIAP DESA)

Identifikasi tingkat kekumuhan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Indikator Penilaian terdiri dari 7 Indikator dan 19 Kriteria.

- 1 KONDISI BANGUNAN**
- Ketidakteraturan Bangunan (Unit)
  - Kepadatan Bangunan (Ha)
  - Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (Unit)

- 2 KONDISI JALAN LINGKUNGAN**
- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (M)
  - Kualitas Permukaan jalan Lingkungan (M)

- 3 KONDISI AIR MINUM**
- Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK)
  - Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum (KK)

- 4 KONDISI DRAINASE**
- Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air (Ha)
  - Ketersediaan Drainase (M)
  - Ketidakterhubungan dgn Drainase Kota (M)
  - Tidak Terpeliharanya Drainase (M)
  - Kualitas Konstruksi Drainase (M)

- 5 KONDISI AIR LIMBAH**
- Sistem Tidak Sesuai Standar Teknis
  - Sarana/Prasarana Tidak Sesuai Standar

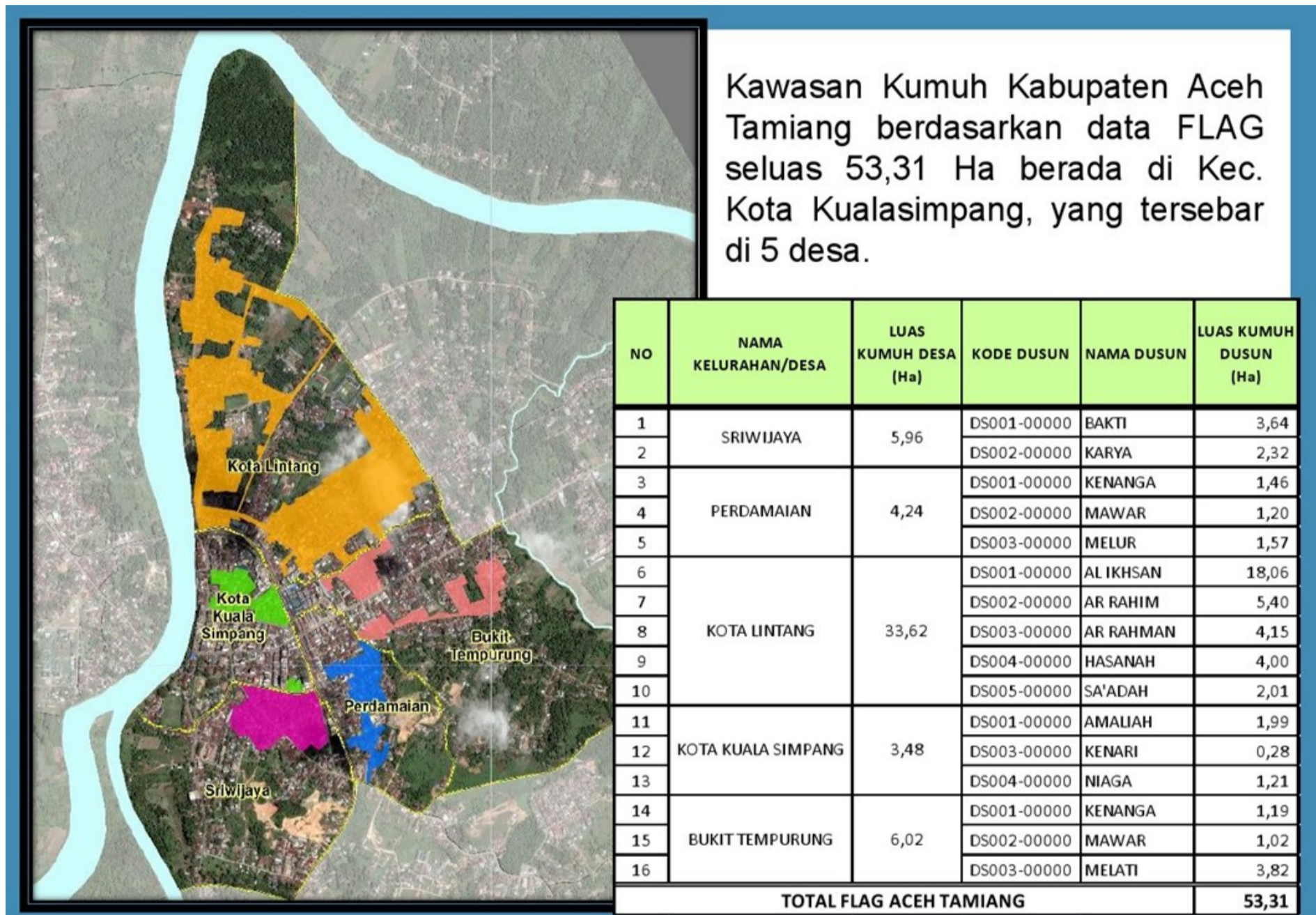
- 6 KONDISI PERSAMPAHAN**
- Sarpras Tidak Sesuai Standar Teknis
  - Sistem Tidak Sesuai Standar Teknis
  - Sarpras Tidak Terpelihara

- 7 KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN**
- Tidak Tersedia Prasarana Proteksi Kebakaran
  - Tidak Tersedia Sarana Proteksi Kebakaran

## Sebaran Kumuh

- Luas Kumuh di Aceh Tamiang yang menjadi target RPJMN menggunakan luas kumuh FLAG seluas 53,31 Ha terletak di Kecamatan Kota Kualasimpang tersebar 5 desa dan 16 dusun, termasuk dalam kategori **KUMUH RINGAN**.
- Pengurangan Kumuh di Aceh Tamiang tahun 2017 melalui kegiatan BDI di Kampung Perdamaian seluas 1,21 Ha.
- Melalui Review Data Baseline dan hasil skoring NUMERIK tahun 2017 bahwa 2 dusun di Kampung Kota Kualasimpang (Kenari dan Niaga) seluas **1,49 Ha** sudah **TIDAK KUMUH**, sehingga menyisakan 1 dusun (Amaliah)
- Target Pengurangan Kumuh sampai tahun 2019 (akhir RPJMN) seluas 51,82 Ha

## TARGET KOTAKU



## PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Penanganan permukiman kumuh dilakukan berdasarkan identifikasi awal (Ro) di setiap dusun/desa terhadap infrastruktur yang memiliki *skor tinggi*.
2. Penanganan kumuh dilakukan melalui kegiatan **skala kota** dan **skala lingkungan**
3. Skala Kota dilakukan terhadap jaringan primer/sekunder melalui Satker PKP Provinsi Aceh.
4. Penanganan skala lingkungan dilakukan terhadap infrastruktur yang berada di lingkungan yang berada di deliniasi **FLAG**.
5. Penanganan skala lingkungan dilakukan dengan dana BDI ataupun kolaborasi dengan peningkatan infrastruktur dilokasi kumuh (Dana Desa, APBK, Swasta)

## SIMULASI BDI NSUP DAN KOLABORASI



Kegiatan Simulasi BDI NSUP dan KOLABORASI tahun 2018 di buka oleh Sekretaris BAPPEDA Aceh Tamiang, KBIK Mandiri Jum'at, 8 Juni 2018

Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas (berbasis komunitas) maka KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat. Sehingga perencanaan daerah mengakodir kebutuhan yang mendukung perencanaan yang lebih komprehensif. Berikut kata pembuka dari bapak Dedi Nurfadli ST selaku perwakilan pokja PKP Aceh Tamiang.

Kegiatan KBIK Mandiri yang di buka oleh Bapak Fadli Maulana, ST. MT. Selaku Sekretaris Bappeda Aceh Tamiang Kegiatan ini mengangkat tema “Simulasi Kegiatan BDI NSUP dan KOLABORASI Aceh Tamiang” terkait dengan saat ini lagi proses kelengkapan pemberkasan BDI NSUP 2018. Berbagai bahan kajian yang didukung penuh oleh masyarakat Kampung guna melengkapi data dasar pendukung 100.0.100 data baseline serta menjadi perhatian khusus bagi peserta rapat koordinasi Pokja PKP, Satker PIP, Camat Kecamatan Kuala Simpang, Datuk dan BKM kecamatan kota Kuala Simpang, SANIMAS, P3MD, dan Tim Kota Tanpa Kumuh Aceh Tamiang. Demi menyikapi kelengkapan data permasalahan persoalan kumuh.

Mencermati UU Desa dan Permendagri no 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Diketahui bahwa RPJM Desa merujuk pada perencanaan Pemda yang berorientasi pada 100.0.100 dengan muatan Pembangunan Sanitasi, Air Bersih dan Prasarana dasar yang tercantum dalam RPJMN dan dokumen strategis Kota. Dokumen perencanaan Kampung mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kota, Proses penyusunan Pembangunan Kampung yang terdiri dari Bidang Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Peran Pemda dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), antara lain, membangun kolaborasi antarpelaku, program dan pendanaan dalam percepatan penanganan kawasan kumuh. Kedua, sebagai regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunan permukiman. *Ketiga*, mensinergikan perencanaan penangan permukiman kumuh skala lingkungan dengan skala kota/kawasan.

Pada kesempatan lain pak dedi selaku Pokja PKP menegaskan bahwa daerah akan konsisten dalam pencapaian target penanganan kumuh sesuai hasil simulasi pengurangan kumuh BDI NSUP dan kegiatan Kolaborasi dalam tahun 2018 ini. Dukungan penuh melalui APBK dan ADG saat ini merupakan tolak ukur sementara dalam hasil indikator kinerja pencapaian target.

Sementara paparan dari kerkot 02 Aceh Tamiang Siti khadzah mengatakan bahwa untuk mengukur indikator kinerja dari hasil Simulasi dengan memetakan data kegiatan melalui BDI NSUP KOTAKU 2018 yang saat ini proses pelaksanaan dilapangan dan hasil kegiatan ADG yang juga lagi proses pelaksanaan dilapangan. Untuk sementara ini kita juga belum sepenuhnya memetakan hasil kegiatan APBN yang ada di daerah.

Sehingga rencana investasi yang saat ini lagi berjalan dilapangan merupakan hasil akhir yang berkontribusi dalam target daerah.

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas kampung, kawasan dan kabupaten. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh

## SIMULASI BDI NSUP DAN KOLABORASI



Komitmen daerah dalam target pengurangan luasan kumuh tahun 2018 melalui KOLANO-RASI oleh Sekretaris BAPPEDA Aceh Tamiang, , 8 Juni 2018, Bapak Fadli Maulana, ST.

Selanjutnya memastikan hasil monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan secara berkala guna ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Kegiatan ditutup dengan expose siteplan lokasi BDI NSUP KOTAKU yang terkoneksi dengan kegiatan melalui dana Kampung.

### KENDALA

Secara umum dari ke 4 (empat) Lokasi mempunyai kendala yang sama dikarenakan kondisi tipologi lahan yang sama:

1. Permasalahan Jalan Lingkungan
  - Tidak tersedia tanah untuk pelebaran minimal 2 m.
  - Tidak tersedia lahan untuk pembuatan drainase lingkungan.
  - Izin lahan yang tidak setuju pemilik lahan di berapa titik.
2. Permasalahan Drainase Lingkungan.
  - Lokasi tipologi tanah berupa cekungan mengakibatkan tidak berdampak apabila dibangun drainase(dapat menyebabkan berpindahnya air dari saluran drainase ke pemukiman).
  - Tidak tersedianya lahan (Izin Lahan dan tanah untuk pelebaran)
  - Tidak ada Muara saluran Drainase (Tidak tersambung dengan sistem Drainase Kota).
3. Permasalahan Persampahan.
  - Masyarakat enggan memberikan izin lahan membangun infrastruktur persampahan.
  - Keberatan dengan izin Lahan ± 10 tahun.
  - Belum ada aturan pengelolaan sampah terpadu di desa.
4. Desa Kampung Kota setelah di telusuri tim Permasalahan Drainase hanya permasalahan Normalisasi dan kegiatan belum sampai umur > 5 Tahun, praktis hanya penyelesaian persampahan.

### KESIMPULAN

Dari Hasil Perencanaan BDI 2018 di Kampung Kotalintang, Sriwijaya dan Bukit Tempurung diharapkan :

1. Desa Sriwijaya Turun kekumuhan dari 36 (Kumuh ringan) menjadi 16 (Tidak Kumuh).
2. Desa Kotalintang Turun kekumuhan dari 35 (Kumuh ringan) menjadi 15 (Tidak Kumuh).
3. Desa Bukit Tempurung Turun Kekumuhan dari nilai 36 menjadi 20 (Kumuh ringan)
4. Sedangkan Kampung Kota turun kekumuhan dari 17 (tidak Kumuh) menjadi 16 (tidak kumuh)

Perhitungan simulasi kumuh R0 Terlampir.



## SITE PLAN Kampung Alokasi BDI 2018

### KAMPUNG BUKIT TEMPURUNG

REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN GANG SD 7 DUSUN MELATI SEPANJANG 286 METER.




**RENCANA AWAL**                      **RENCANA DESIGN**

Jalan Lingkungan di depan SD 7 Konstruksi awal Rabat Beton dan mengalami Patahan dan menjadi daerah genangan di dusun Melati di rehabilitasi menggunakan Paving Block.

fppt.com

### KAMPUNG SRIWIJAYA

REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN GANG MESJID DUSUN BHAKTI SEPANJANG 234 METER.




**RENCANA AWAL**                      **RENCANA DESIGN**

Kondisi Jalan lingkungan yang berupa tanjakan direncanakan penggunaan rabat beton beralur kasar mencegah terjadinya kecelakaan.

fppt.com

### KAMPUNG KOTALINTANG

REHABILITASI SALURAN RAWALINTANG DUSUN AR RAHMAN SEPANJANG 80 METER.




**RENCANA AWAL**                      **RENCANA DESIGN**

Saluran Rawa Lintang dusun Ar rahman perlu pembenahan secara menyeluruh dikarenakan lantai saluran yang tidak teratur elevasinta dan beberapa titik saluran mengalami patahan.

fppt.com

### KAMPUNG BUKIT TEMPURUNG

REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN GANG KURNIA DUSUN SEPANJANG 272 METER.




**RENCANA AWAL**                      **RENCANA DESIGN**

Rehabilitasi Jalan Lingkungan Gang Kurnia di dusun Melati desa Bukit Tempurung menjadikan jalan lingkungan yang layak

fppt.com



## LUASAN KUMUH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DESA	DUSUN	LUASA (Ha)
Kampung Kota Kualasimpang	Amaliah	1,99
	Niaga	1,21
	Kenari	0,27
		<b>3,47</b>
Sriwijaya	Karya	2,32
	Bhakti	3,64
		<b>5,96</b>
Perdamaian	Mawar	1,19
	Kenanga	1,46
	Melur	1,57
		<b>4,22</b>
Bukit Tempurung	Kenanga	1,19
	Mawar	1,02
	Melati	3,82
		<b>6,03</b>
Kota Lintang	Al Ikhsan	18,06
	Saadah	2,01
	Ar Rahman	4,15
	Ar Rahim	5,40
	Hasanah	4,00
		<b>33,62</b>
Total Ha Kumuh		<b>53,3</b>

## PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT NATIONAL SLUMP UPGRADING PROGRAM (NSUP) PROGRAM KOTA TANPA KUMUH – KABUPATEN ACEH TAMIANG



**Koaching Klinik RPLP**

Peningkatan Kapasitas dalam Program KOTAKU merupakan salah satu pilar penting, karena merupakan system yang akan menghantarkan tercapainya tujuan program . Peningkatan kapasitas bertujuan membangun gaerakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat melalui perubahan prilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan ditingkat kabupaten/kota dan kelurahan/desa .

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan ditingkat Kabupaten/kotan dan ditingkat Kampung secara sinergis dengan *platform adalah Kolaborasi* Tujuan tersebut diatas, diterjemahkan ke dalam dua kegiatan yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang mempertemukan perencanaan makro (top down) dan perencanaan mikro (bottom up) dengan mendudukan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan pengambil keputusan akhir bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun tujuan dari Pelatihan Pengembangan Kapasitas Program KOTAKU di tingkat Kelurahan/Desa adalah :Menjadi dasar kegiatan pengembangan kapasitas program KOTAKU tingkat Kelurahan/Desa.

1. Membangun kolaborasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman melalui pengembangan kapasitas bagi seluruh pelaku
2. Membangun pemahaman dan keterampilan pelaku dalam melaksanakan kegiatan program KOTAKU di tingkat Kelurahan/Desa.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) di Kabupaten Aceh Tamiang ada di 5 Kampung peningkatan kualitas permukiman, yaitu : Kota Kualasimpang, Srwijaya,Perdamaian, Bukit Tempurung dan Kota Lintang yang berada dalam 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Kualasimpang. Adapun jenis pelatihan lokasi peningkatan kualitas, terdiri dari :

1. Pelatihan BKM/LKM,Lurah/Kepala Desa dan Camat
2. Coaching Klinik Review Perencanaan
3. Pelatihan KSM/KPP
4. Pelatihan livelihood
5. Pelatihan Keterampilan
6. FGD Perubahan Sikap dan Prilaku
7. Pengembangan Media Sosialisasi

Kesemuanya pelatihan tersebut dilaksanakan selama 2(dua) hari berdasarkan jadwal yang telah disepakati pada saat rapat pembentukan panitia dimasing-masing Kelurahan/desa, dengan mengalokasikan dana 10juta/Desa. Kegiatan ini berlangsung di Bulan Juni dan berakhir di minggu pertama Bulan Agustus.



**PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT  
NATIONAL SLUMP UPGRADING PROGRAM (NSUP)  
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH – KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan permukiman Kumuh Nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Direktorat Jendral Cipta Karya tahun 2015 – 2017. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh di Kelurahan /Desa menjadi 0 Ha. Untuk mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

**DOKUMENTASI KEGIATAN PKM KABUPATEN ACEH TAMIANG**



Pelatihan KSM/KPP Kampung Sriwijaya dan Kampung Kota  
(27/7/2018)



Coaching Klinik Kampung Sriwijaya (1/8/2018)



Coaching Klinik Kampung Bukit Tempurung dan Kota Lintang



## DIAGRAM ALUR TAHAPAN KOLABORASI KOTAKU



## 3.2. INISIASI KOLABORASI



## INDIKATOR KINERJA KOLABORASI



## DUA KAMPUNG DI ACEH TAMIANG PENERIMA DANA BDI TERBESAR

Berdasarkan hasil Quick Count penanganan permukiman kumuh secara Nasional luasan kumuh Aceh Tamiang tahun 2017 sebesar 53,31 Ha, yang berada di lokasi perkotaan. Kabupaten Aceh Tamiang. Ketika luasan Kumuh nasional disandingkan dengan data baseline Program Kota tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2015 maka dilakukan perhitungan pengurangan kumuh (R0) dengan melihat hasil numeric terbesar dalam penentuan intervensi kegiatan di 7 (tujuh) indikator kumuh.

Kampung Kota Lintang dan Kampung Bukit Tempurung, adalah 2 kampung di Kecamatan Kota kwalasimpang penerima dana BDI tahun 2018 Program KOTAKU dengan nominal terbesar, masing-masing 1M dan 2M, dengan kegiatan 100% adalah infrastruktur. untuk alokasi kegiatan infrastruktur dan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) merupakan BOP (Biaya Operasional Pekerjaan) adapun kegiatan dalam pengurangan kumuhnya adalah kegiatan jalan lingkungan dan Drainase. Sementara untuk Kota Lintang teralokasi dana sebesar Rp 1.995.000.000. untuk penanganan kumuh (kegiatan infrstruktur) dan BOP sebesar Rp.5.000.000 dengan kegiatan pengurangan kumuhnya adalah jalan lingkungan dan Drainase.



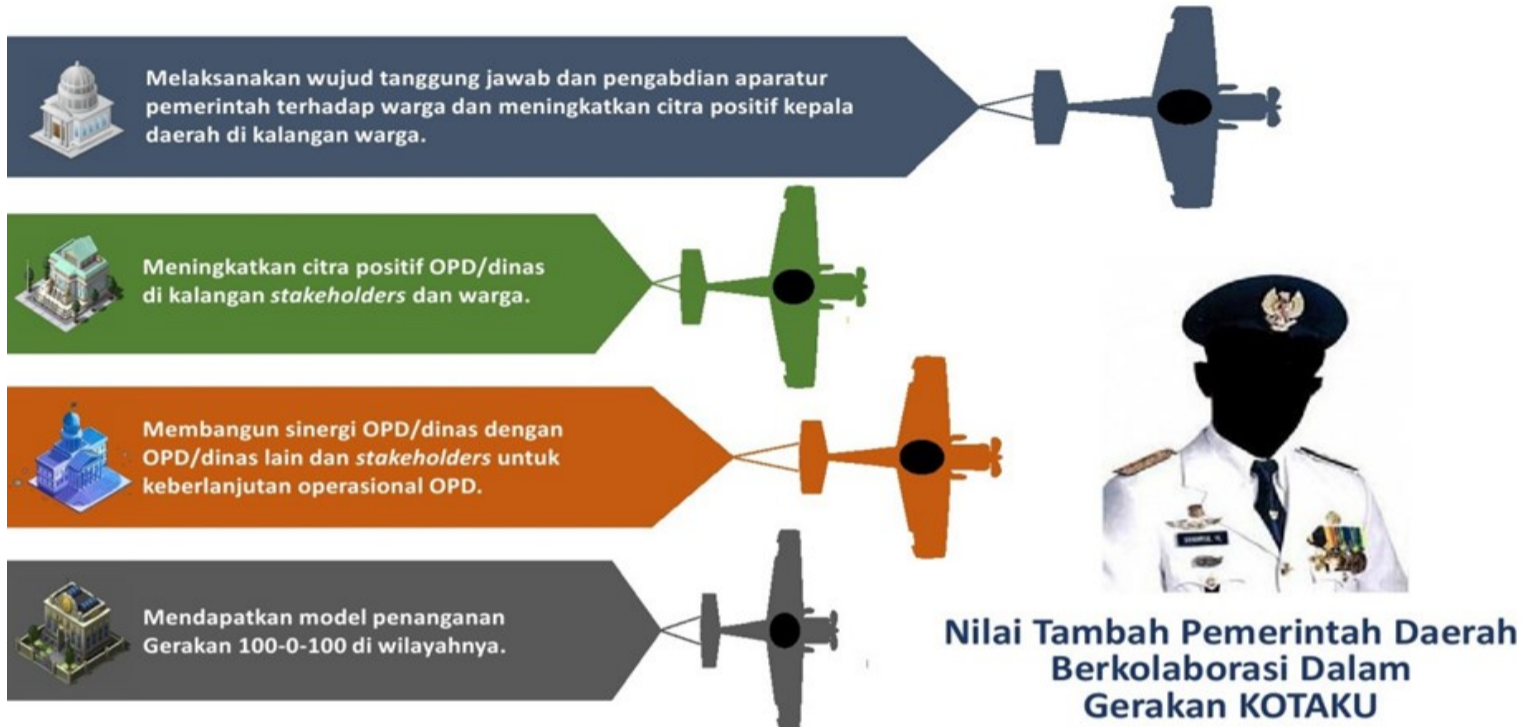
Rakor kesiapan KSM Kampung Bukit Tempurung yang dihadiri Korkot 02 Aceh Tamiang Program KOTAKU

Sistem pencairan dana BDI dilakukan dengan cara pembukaan rekening oleh KSM yang dana kegiatannya di transfer dari rekening BKM/LKM, pencairan dana ke rekening BKM/LKM sebesar 70% dari alokasi total dana kegiatan BDI. Sementara BKM/LKM men-transfer dana secara bertahap ke KSM masing-masing : 30%-60%-10% dengan limit waktu penyelesaian kegiatan di lapangan 1,5 bulan pekerjaan.

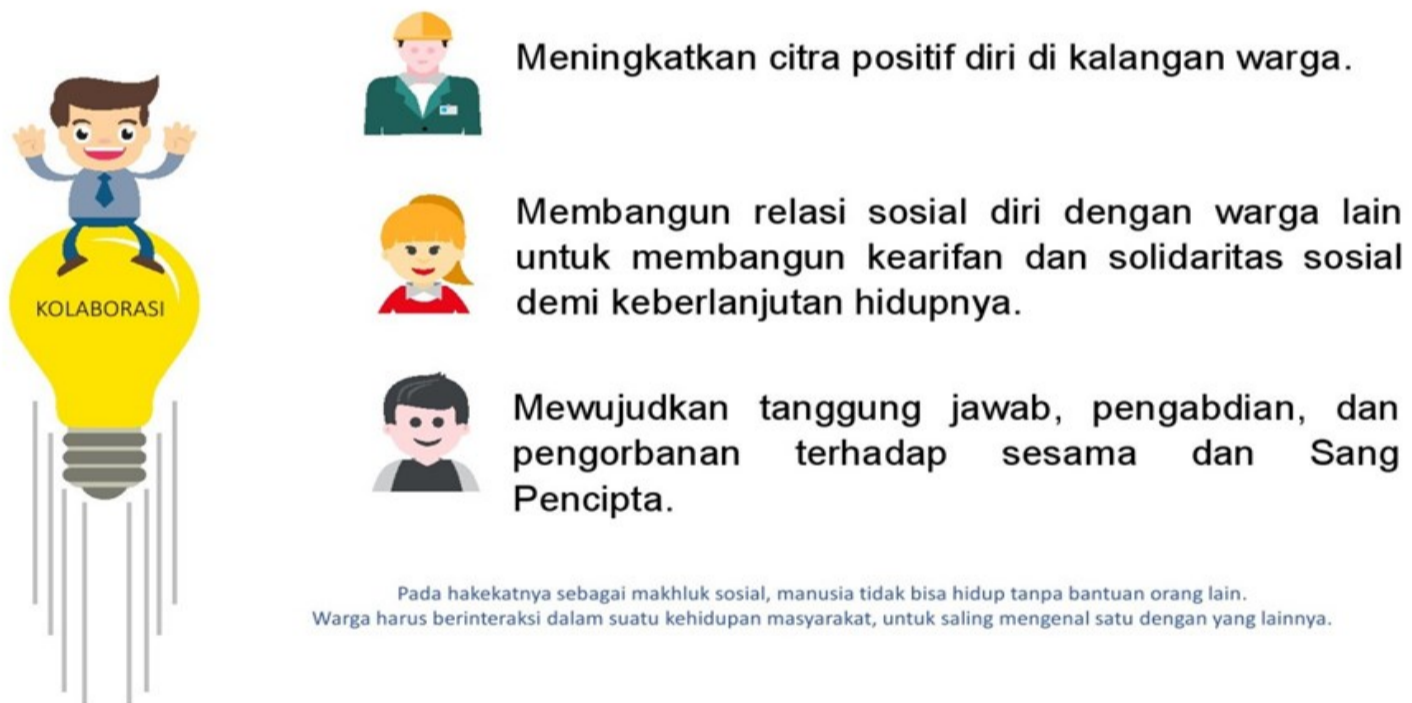
Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan maka dibentuk KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. KSM ini dipilih berdasarkan hasil musyawarah kampung, dimana anggota KSM terdiri dari masyarakat penerima manfaat di Kampung tersebut. Kampung Bukit Tempurung telah terbentuk 9 KSM dan Kota Litnang 21 KSM untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan. Begitu juga dengan kampung Sriwijaya dengan 7 KSM sudah mendahului akan proses pelaksanaan dengan kesiapan berkas yang mendukung kegiatan. Sedangkan kampung kota kwalasimpang sudah pada tahapan pisik 80% pelaksanaan di lapangan, dengan dukungan dan kegiatan yang sudah siap dan data yang mendukung.



Suasana persiapan administrasi KSM BDI Tahun 2018 di Sekertariat LKM Muda Sesia Kp.Kota Lintang



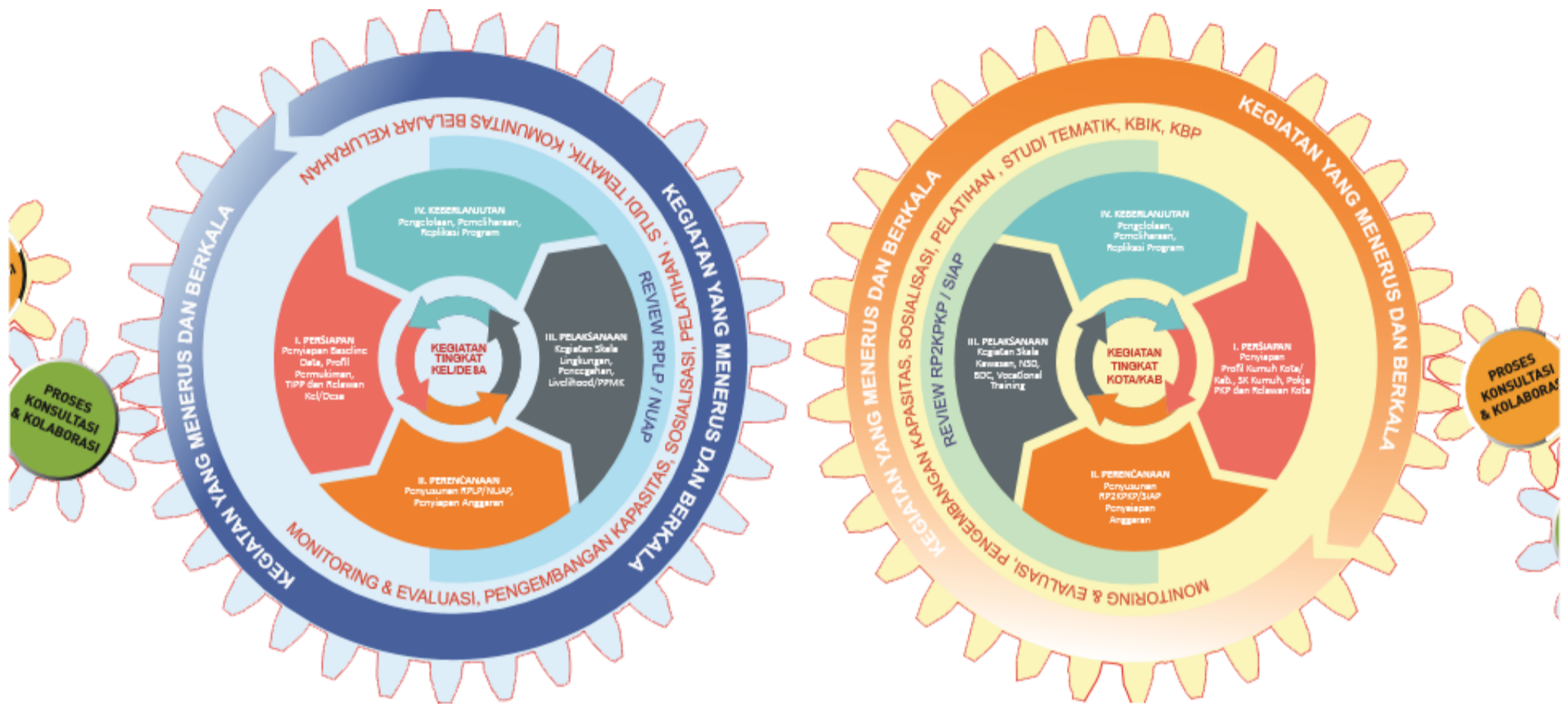
## NILAI TAMBAH WARGA BERKOLABORASI DALAM GERAKAN KOTAKU



## NILAI TAMBAH CSR BERKOLABORASI DALAM GERAKAN KOTAKU



## SIKLUS KOTAKU



## KEGIATAN KOTAKU

### A. PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

1. Infrastruktur skala kawasan, pembangunan infrastruktur berjangkauan yang menghubungkan infrastruktur tersier ke primer dan sekunder;
2. Infrastruktur skala lingkungan, Pembangunan infrastruktur terkait 7+1 indikator kumuh yang ada di RPLP masyarakat skala kelurahan;
3. Pusat Pengembangan Usaha (BDC), pengembangan jaringan bisnis usaha kecil masyarakat di tingkat kota/kabupaten
4. Pengembangan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK), pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha kecil.

### B. PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU

1. Investasi Infrastruktur Kota (Kolaborasi), infrastruktur berjangkauan untuk pencegahan permukiman kumuh baru
2. Infrastruktur tingkat Kelurahan, pembangunan infrastruktur sesuai gap permasalahan yang ada di RPLP masyarakat skala kelurahan;